

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Politik & Keamanan
Vol 01, Ed 14, Agustus 2021

**Ancaman Siber di Era
Berkembangnya TIK**

Hal. 1

**Penerapan Standar Pelayanan
Minimal di Daerah**

Hal. 3

**Kendaraan Bermotor Penopang
PNBP Kepolisian**

Hal. 5



Daftar Isi

Ancaman Siber di Era Berkembangnya TIK.....	1
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah.....	3
Kendaraan Bermotor Penopang PNBK Kepolisian	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi I

POLITIK DAN KEAMANAN

Ancaman Siber di Era Berkembangnya TIK

HIGHLIGHT

- Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku-pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus ancaman siber.
- Sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami serangan siber mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41% dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta (BSSN, 2021).
- Pada tahun 2017 insiden keamanan siber di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi sekitar USD34,2 miliar atau Rp478,8 triliun (setara dengan 3,7% dari total GDP Indonesia sebesar USD932 miliar).
- Penguatan keamanan siber menjadi suatu kewajiban prioritas bagi negara dan semua instansi didalamnya sebagai bagian dalam mewujudkan keamanan nasional, dimana tingkat urgensi keamanan siber berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pemanfaatan di ruang siber tersebut.

Kini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dll. Pertumbuhan TIK di Indonesia sendiri berkembang cukup pesat terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Angka tersebut naik 64,8% jika dibandingkan tahun 2018. Di satu sisi, peningkatan pengguna internet ini merupakan berita baik atas meningkatnya kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun di sisi lain ancaman keamanan siber pun juga turut semakin meningkat. Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku-pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus ancaman siber di Indonesia.

Kondisi Ancaman Siber di Indonesia

Serangan siber merupakan serangan pada sistem komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan kendali atau akses tanpa izin ke sistem komputer yang ditargetkan (Maurer & Morgus, 2014; Marshall & Saulawa, 2015). Sementara kejahatan siber adalah aktivitas ilegal yang menggunakan dan menargetkan sistem atau jaringan komputer (ITU, 2012) untuk menimbulkan kerugian materiil atau *immaterial* pada pihak yang menjadi target (Wilson, 2008). Pada dasarnya tidak semua serangan siber diartikan sebagai kejahatan, namun baik serangan siber maupun kejahatan siber dianggap sebagai ancaman siber. Ancaman siber sendiri merupakan tindakan yang mungkin muncul dan berpotensi menyebabkan masalah serius terhadap jaringan atau sistem komputer dan berdampak dalam segala aspek (CIPS, 2019).

Berdasarkan laporan data anomali trafik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2021, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami serangan siber hingga 495,3 juta kali, atau meningkat 41% dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Anomali trafik tertinggi terjadi pada tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah mencapai 7.311.606 anomali. Trojan menjadi anomali dengan jumlah tertinggi. Amerika Serikat merupakan negara

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Ade Nurul Aida

sumber anomali dengan jumlah serangan tertinggi selama tahun 2020. Dan Indonesia juga merupakan negara dengan serangan tertinggi yang menjadi tujuan dari anomali yang berasal dari negara Indonesia sendiri (dengan alamat IP Indonesia). Dari laporan tersebut juga dideteksi terjadinya email *phishing* sebanyak 2.549 kasus dengan peningkatan jumlah kasus email *phishing* terjadi di bulan Maret - Mei 2020; 79.439 akun yang mengalami data *breach*, dimana Insiden data *breach* menjadi topik besar di Indonesia selama tahun 2020 sejak bocornya 91.000.000 data berupa identitas pengguna salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia yakni Tokopedia, yang tidak lama kemudian disusul oleh kebocoran data 1,2 juta pengguna situs Bhinneka; dan sebanyak 9.749 mengalami *web defacement* dimana sektor akademik menjadi sektor dengan kasus terbanyak pada tahun 2020. Sementara pada Januari hingga Juli 2021 anomali trafik/ serangan siber telah mencapai 741,4 juta, dimana kategori anomali terbanyak yakni *Malware*, *Denial of Service*, dan *Trojan Activity*. Sama halnya dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim), yang melihat adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana Laporan kejahatan siber meningkat dari 4.360 laporan (2018) menjadi 4.586 laporan (2019) (Patrolisiber, 2020).

Kerugian akibat Ancaman Siber

Kerugian dari serangan siber dan kejahatan siber tergantung pada karakteristik korban. Bagi korban korporasi, serangan siber dan kejahatan siber menyebabkan kerugian ekonomi dalam bentuk berkurangnya laba, kerugian nilai pasar, tuntutan hukum, dan rusaknya reputasi. Bagi korban individu, kerugian dari serangan siber dan kejahatan siber menyebabkan dampak stres dan psikologis, pencurian identitas, dan kerugian finansial (Acquisti, Friedman, & Telang, 2006; Agrafiotis et al., 2018; Telang & Watel, 2007;).

Berdasarkan studi Frost & Sullivan yang dilakukan Microsoft (2018) menemukan bahwa tiga dari lima (60%) perusahaan di Asia Pasifik menunda transformasi digital karena kekhawatiran akan risiko dari serangan siber. Serangan siber dapat merugikan perusahaan besar rata-rata USD18,7 juta baik dalam kerugian ekonomi langsung dan tidak langsung. Sementara untuk perusahaan menengah, rata-rata kerugian ekonomi adalah USD47.000 per perusahaan. Bahkan hampir tiga dari empat (73%) serangan keamanan siber selama 1 tahun telah mengakibatkan hilangnya pekerjaan di berbagai sektor.

Insiden keamanan siber di Indonesia pada tahun 2017 menyebabkan kerugian ekonomi sekitar USD34,2 miliar atau Rp478,8 triliun (setara dengan 3,7% dari total GDP Indonesia sebesar USD932 miliar) (BSSN, 2021). Penghitungan tersebut termasuk kerugian yang bersifat: langsung – kerugian finansial dari kerugian produktivitas, denda, dan biaya perbaikan; tidak langsung – hilangnya kesempatan karena perusahaan harus membangun kembali hubungan dengan konsumen setelah reputasinya rusak; dan terinduksi – insiden keamanan siber memiliki dampak pada ekonomi dan ekosistem yang lebih luas sehingga menyebabkan penurunan jumlah konsumen dan pendapatan.

Ancaman terhadap ruang siber sendiri merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya era teknologi informasi dan komunikasi. Penguatan keamanan siber merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi suatu kewajiban prioritas bagi negara dan semua instansi di dalamnya sebagai bagian dalam mewujudkan keamanan nasional, dimana tingkat urgensi keamanan siber berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pemanfaatan di ruang siber tersebut.

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

HIGHLIGHT

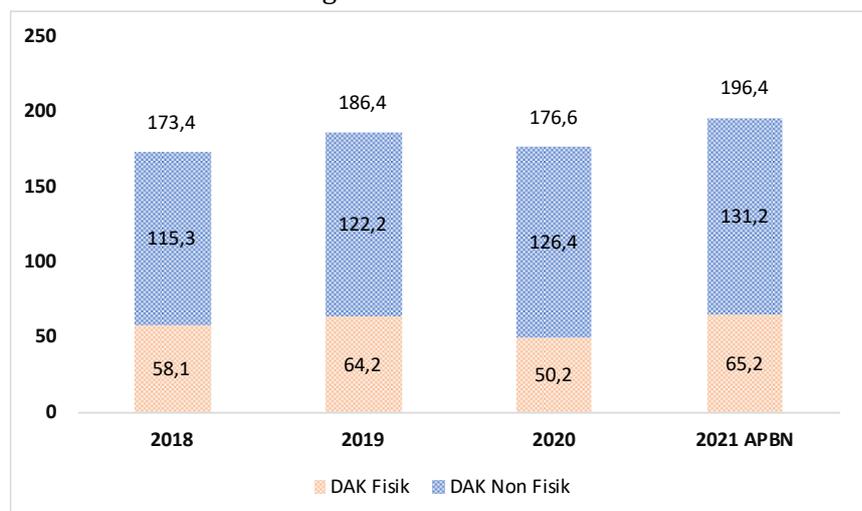
- Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk mampu menyediakan pelayanan secara optimal dengan ukuran kelayakan minimal kepada masyarakat.
- SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- DAK difokuskan dalam mendanai urusan daerah yang menjadi prioritas nasional dalam rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- Pada Tahun 2019 capaian SPM pada level provinsi tertinggi dan Kabupaten/Kota tertinggi adalah pada bidang Kesehatan.
- Pada tahun 2020 capaian SPM provinsi tertinggi yaitu kesehatan, sedangkan pada level kabupaten/kota, capaian SPM tertinggi ada pada pendidikan.
- Kemendagri harus terus melakukan asistensi/ supervisi ke pemerintah daerah secara kontinu, melakukan sosialisasi kebijakan penerapan SPM dan juga memantau implementasi penerapan SPM.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memberikan pelayanan umum yang lebih baik. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan secara optimal dengan ukuran kelayakan minimal kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan sosial.

Dukungan APBN salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana DAK difokuskan dalam mendanai urusan daerah yang menjadi prioritas nasional dalam rangka mendorong pencapaian SPM. Dalam pelaksanaannya memang DAK bukan satu-satunya sumber pendanaan daerah dalam penyediaan layanan dasar sesuai SPM, namun DAK dapat menjadi stimulan dalam pencapaian standar SPM.

Gambar 1. Perkembangan Dana Alokasi Khusus 2018-2021



sumber: Kementerian Keuangan 2021, diolah

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: · Rendy Alvaro · Nova Aulia Bella

Terlihat dari Gambar 1, perkembangan Dana Alokasi Khusus dalam APBN yang ditransfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp173,4 triliun menjadi Rp196,4 triliun pada tahun 2021.

Capaian Penerapan SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM, target pencapaian seluruh bidang SPM adalah sebesar 100% dari perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah. Kemendagri merekapitulasi pelaporan SPM yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang kemudian dilakukan analisis terhadap capaian penerapan per bidang SPM. Pada Tabel 1 terlihat pada tahun 2019 dari 487 pemerintah daerah yang sudah melaporkan SPM terdapat capaian SPM provinsi tertinggi adalah pada bidang kesehatan yaitu sebesar 80%, sedangkan capaian terendah terdapat pada bidang perumahan rakyat yaitu mencapai 46,07%. Sedangkan jika dilihat pada level kabupaten/kota pada tahun 2019, untuk capaian SPM kabupaten/kota tertinggi ada pada bidang kesehatan yaitu sebesar 71,95% dan terendah terdapat pada bidang perumahan rakyat yaitu sebesar 15,99%.

Tabel 1. Rata-rata capaian Penerapan SPM Tahun 2019 dan 2020

No.	Bidang SPM	Rata-Rata Capaian 2019		Rata-Rata Capaian 2020	
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Pendidikan	57,85%	61,79%	68,10%	71,34%
2	Kesehatan	80,00%	71,95%	97,12%	70,36%
3	Pekerjaan Umum	49,81%	56,71%	51,27%	65,78%
4	Perumahan Rakyat	46,07%	15,99%	54,69%	46,84%
5	Trantibumlinmas	54,19%	52,50%	68,31%	63,40%
6	Sosial	63,85%	52,84%	67,74%	65,08%
	Rata-rata	58,63%	51,96%	67,87%	63,80%

Sumber: Lakin Ditjen Bina Bangda TA 2020, Kemendagri 2021, diolah

Sementara untuk tahun 2020 daerah yang melaporkan SPM sebanyak 34 Provinsi, 364 kabupaten dan 90 kota. Jika dilihat rincian capaian kinerja SPM per bidang, capaian penerapan SPM provinsi tertinggi yaitu kesehatan 97,12% terendah ada pada pekerjaan umum 51,29%. Sedangkan pada level kabupaten/kota, capaian penerapan SPM tertinggi ada pada pendidikan 71,34% dan terendah pada perumahan rakyat 46,84%. Secara umum rata-rata capaian penerapan SPM mengalami peningkatan.

Beberapa isu strategis yang muncul dalam penerapan SPM ini yaitu: 1) belum seluruh daerah mengimplementasikan dan mengintegrasikan SPM masuk pada dokumen perencanaan daerah; 2) laporan penerapan SPM masih sangat bervariasi dan belum sistematis menggambarkan capaian SPM; 3) belum seluruh pemerintah daerah menerapkan tim penerapan SPM sehingga kolaborasi antar instansi pengampu SPM belum maksimal, serta 4) pemerintah daerah belum melaksanakan SPM sesuai dengan tahapan penerapan SPM (Kemendagri, 2021). Untuk itu, Kemendagri harus terus melakukan asistensi/ supervisi yang sesuai salah satu peran dan tugas nya dalam pembinaan pembangunan daerah ke pemerintah daerah secara kontinu dan juga meningkatkan pengawasan penerapan SPM pada tahun berjalan sehingga penggunaan dukungan anggaran pemerintah baik dari pemerintah daerah sendiri maupun dari APBN yang salah satu nya dari DAK juga dapat menghasilkan *outcome* yang tepat sasaran dan tepat guna dalam pencapaian penerapan SPM.

Komisi III

POLITIK DAN KEAMANAN

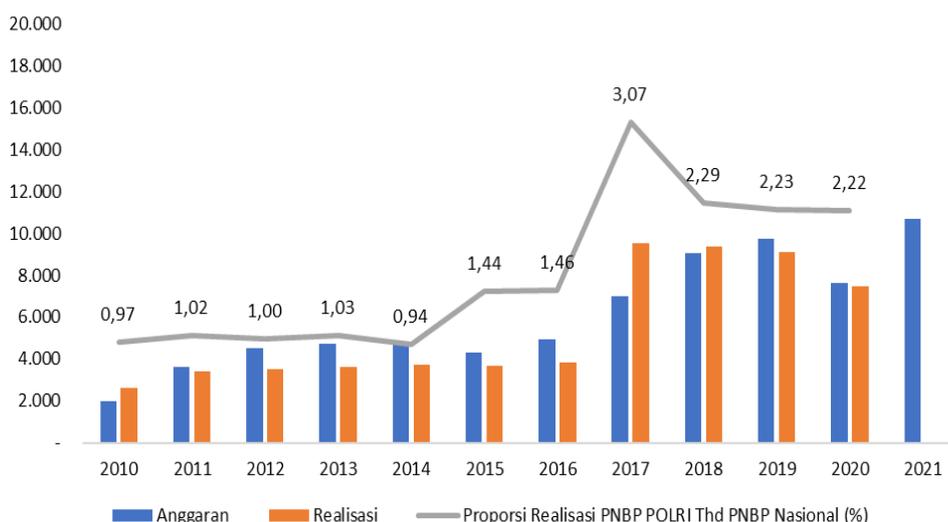
Kendaraan Bermotor Penopang PNBP Kepolisian

HIGHLIGHT

- Perkembangan PNBP Kepolisian RI selama 11 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan.
- Peningkatan ini merupakan dampak reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian.
- Proporsi PNBP Kepolisian terhadap PNBP Nasional juga meningkat dari 1,46% (2016) menjadi 3,07% (2017).
- Namun setelah tahun 2017, kinerja PNBP Kepolisian RI mengalami penurunan.
- PNBP Kepolisian ditopang oleh Pendapatan yang berasal dari kendaraan bermotor mencapai lebih dari 90% PNBP.
- Apabila dilihat perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang mengalami tren meningkat, maka seharusnya realisasi PNBP Kepolisian mengalami peningkatan sejak tahun 2017.
- Namun pada kenyataannya, justru penerimaan PNBP Kepolisian mengalami penurunan.
- Kepolisian perlu memberikan stimulus untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi.

Perkembangan realisasi PNBP Kepolisian RI selama 11 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai Rp9,5 triliun. Peningkatan ini merupakan dampak reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian. Selain itu juga pada tahun 2017 sudah mulai menerapkan tarif layanan PNBP baru yang tercantum pada PP No. 60 tahun 2016. Proporsi PNBP Kepolisian terhadap PNBP Nasional juga meningkat dari 1,46% (2016) menjadi 3,07% (2017). Namun setelah tahun 2017, kinerja PNBP Kepolisian RI mengalami penurunan.

Gambar 1. Perkembangan PNBP Kepolisian (miliar rupiah)



Sumber: LKPP, diolah

PNBP Kepolisian sebagian besar ditopang oleh Pendapatan yang berasal dari kendaraan bermotor, antara lain pendapatan dari STNK (26,8%), baik penerbitan STNK ataupun pengesahan STNK, pendapatan BPKB (23,6%), pendapatan TNKB (15%), pendapatan SIM (14,8%), Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (5,5%), pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke Luar Daerah (2,5%), pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (1,8%), serta pendapatan Uji Keterampilan Mengemudi (0,4%) (Tabel 1). Komponen tersebut menopang lebih dari 90% PNBP di Kepolisian. Sehingga penurunan di salah satu komponen ini dapat berdampak terhadap penerimaan PNBP di Kepolisian.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Azizah Ulfa · Ratna Christianingrum · Tio Riyono

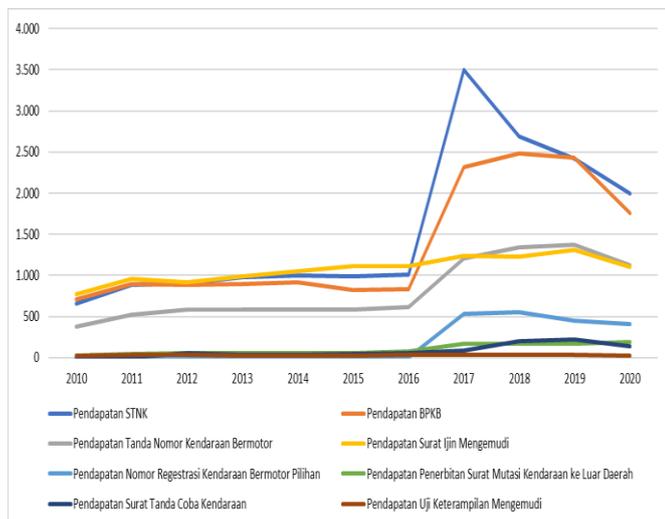
Tabel 1. Proporsi PNBP Kepolisian Tahun 2019-2020 (%)

Jenis	2019	2020
Pendapatan STNK	26,5	26,8
Pendapatan BPKB	26,6	23,6
Pendapatan TNKB	15,0	15,0
Pendapatan SIM	14,3	14,8
Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	5,0	5,5
Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke Luar Daerah	1,9	2,5
Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan	2,4	1,8
Pendapatan Uji Keterampilan Mengemudi	0,3	0,4
Pendapatan Pengamanan Objek Vital	4,4	6,3
Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Catatan Kepolisian	3,3	3,0
Pendapatan Pelayanan Satuan Pengamanan	0,3	0,3
Pendapatan pelayanan kepolisian lainnya	0,1	0,1

Sumber: LKPP, diolah

Pada 2016, Jenis dan tarif PNBK Kepolisian mengalami perubahan dengan diterbitkannya PP No. 60 tahun 2016 yang mencabut PP No. 50 tahun 2010. Salah satu perubahan dalam PP tersebut yaitu kenaikan tarif layanan bahkan jenis PNBK tertentu meningkat lebih dari 100%. Hal ini berimplikasi pada kenaikan PNBK Kepolisian khususnya jenis tertentu penopang PNBK tertinggi. Namun sejak tahun 2017, kinerja realisasi PNBK Kepolisian mengalami penurunan (Gambar 2) khususnya pada empat sektor penopang terbesar yakni pendapatan STNK, pendapatan BPKB, pendapatan TNKB, dan pendapatan SIM. Hal ini menjadi penyebab penurunan realisasi PNBK Kepolisian.

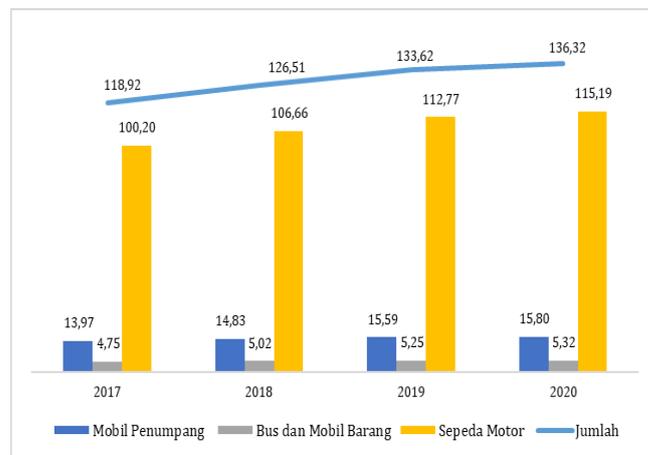
Gambar 2. Perkembangan Penerimaan PNBK Kepolisian Berasal dari Kendaraan Bermotor (miliar rupiah)



Sumber: LKPP, diolah

Di sisi lain perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami tren yang meningkat (Gambar 3). Peningkatan ini ditopang oleh sepeda motor dan mobil penumpang. Apabila dilihat perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang mengalami tren meningkat, maka seharusnya realisasi PNBK Kepolisian mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Namun pada kenyataannya, justru penerimaan PNBK Kepolisian mengalami penurunan. Memang pada 2018 Mahkamah Agung membatalkan pungutan atas biaya administrasi pengesahan STNK. Pungutan yang baru dilakukan sejak 2017 tersebut dinilai bertentangan dengan PP No. 60 tahun 2016. Meskipun begitu jenis PNBK yang lainnya juga mengalami tren penurunan hingga tahun 2019. Kondisi ini dapat mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan PNBK dilihat dari kesadaran tertib administrasi masyarakat yang menurun.

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia (juta unit)



Sumber: BPS, diolah

Kepolisian perlu memberikan stimulus kepada masyarakat dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi. Untuk mendorong realisasi PNBK dari pendapatan STNK, Kepolisian dapat memberikan stimulus berupa penghapusan sanksi keterlambatan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 dimana sanksi tersebut hanya akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi.